

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dengan adanya otonomi daerah, Pengelola keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya Pengelola keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.³

Dewasa ini, tuntutan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemahaman masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penggunaan dana publik oleh pemerintah untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam suatu periode. Akuntabilitas membutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk dapat melahirkan kebijakan publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah di setiap periodenya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan pemerintah. Di dalam laporan keuangan ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah menyalurkan dan memanfaatkan dana anggaran yang diterima di setiap periodenya apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan laporan keuangan yang

³ Arini Novandalina and Fidyah Yuli Ernawati, 'Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang', Jurnal STIE Semarang, 12.3 (2020), hlm 26–41.

berkualitas dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah yang disini berperan sebagai pemegang kepercayaan dapat memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berperan sebagai pihak yang memberi kepercayaan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi penilaian kinerja pemerintah bagi masyarakat.

Penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (KLK).⁴

⁴ Arini Novandalina and Fidyah Yuli Ernawati, 'Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik...', hlm. 27

Menurut data di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), menyebutkan bahwa masih adanya daerah yang belum memperoleh opini WTP menunjukkan pelaporan keuangan di pemerintah daerah belum dapat diyakini kewajarannya oleh BPK dikarenakan beberapa faktor seperti penyajian laporan keuangan yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah, lemahnya sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan pemerintah daerah. Hal ini memotivasi peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKLIK) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah.⁵

Dalam kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan

⁵ Mia Kusumawaty and Jumania Septariani, 'Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Musi Banyuasin)', Jurnal ETAP, 2.2 (2022), hlm 86.

masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP), tidak wajar (TW), dan wajar dengan pengecualian (WDP). Opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai kemungkinan telah terjadi banyak penyimpangan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan betapa semakin pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalaminya guna memberikan pemahaman lebih baik tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks BPKAD Kabupaten Kediri sehingga peneliti mengangkat judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal berpengaruh secara

simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri?
4. Bagaimana pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
3. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

4. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

D. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, akan dibahas identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dalam penelitian, agar pembahasan dalam penelitian, agar penelitian lebih terarah juga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui sejauh mana pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Kediri. Identifikasi masalah yang mungkin muncul antara lain:

1. Kesesuaian standar akuntansi pemerintah dapat secara efektif mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, atau terdapat hambatan atau interpretasi yang dapat menghambat proses tersebut.
2. Kompleksitas implementasi teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dapat menjadi tantangan terutama dalam konteks standar akuntansi pemerintah.
3. Efektivitas pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan apakah ada aspek tertentu dari pengendalian internal yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
4. Perubahan dalam regulasi pemerintah atau standar akuntansi pemerintah dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan dan memerlukan adaptasi dalam pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Penelitian ini berfokus pada pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dibidang yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga dapat dijadikan sebagai dokumen yang akan digunakan mahasiswa lain sebagai sumber referensi.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai sumber informasi terkait Pengelola keuangan daerah di bidang akuntansi, memberikan wawasan mengenai pengembangan standar akuntansi pemerintah, teknologi informasi, dan pengendalian internal sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mewujudkan akuntabilitas di lembaga pemerintahan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri. Dimana yang akan diteliti yaitu pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Karena adanya keterbatasan dari peneliti yang termasuk di dalamnya adalah keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka dalam hal ini peneliti memberikan batas-batasan sebagai berikut:

- b. Penelitian ini hanya membahas pengaruh standar akuntansi pemerintah, pengaruh teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- c. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri yang mengerti dan paham tentang laporan keuangan.
- d. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner (angket).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.⁶
- b. ITTA (*Information Technology Association of America*), mendefinisikan Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hlm. 2

informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman.⁷

- c. Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai pengendalian internal penting bagi akuntan yang berperan sebagai manajer, pengguna, perancang, dan evaluator sistem akuntansi.⁸
- d. Kualitas Laporan Keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dilihat dari seberapa jauh dan lengkapnya catatan keuangan yang disiapkan sampai membentuk laporan keuangan, kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi (tidak ada transaksi yang terlewatkan

⁷ Hapzi Ali, Abshor Marantika, '*Bisnis digital: prospektif & implikatif*', (LD MEDIA : 2023), hlm. 83

⁸ Dasaratha V. Rama, Frederick L. Jones, '*Sistem Informasi Akuntansi*', Edisi 12 (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 132

dari catatan akuntansi), komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang dipakai.⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian untuk memberikan kejelasan mengenai judul dalam penelitian supaya tidak menimbulkan berbagai penafsiran terhadap judul. Maksud dari pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah seberapa besar pengaruh variable bebas tersebut terhadap variable terikat yakni kualitas laporan keuangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri dari:
Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

⁹ Sari Bulan Tambunan, '*Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Bisnis (Tinjauan Pada UMKM)*', (PT. Inovasi Pratama Internasional) hlm. 18

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (a) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (b) teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya (jika ada), (d) kajian penelitian terdahulu, (e) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian (jika diperlukan).

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian; (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis).

Bab V Pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.